

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Timor Timur atau yang sekarang dikenal dengan Negara Democratic Republic Timor-Leste merupakan daerah bekas jajahan Portugis. Selain itu daerah tersebut pernah menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebut daerah tingkat satu Timor-Timur. Timor Timur mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Portugis, wilayah Timor Timur berada dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menjadikannya bagian dari nusantara. Pada saat itu orang Indonesia menyebutnya dengan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil.

Perjalanan sejarah Timor Timur sangatlah panjang. Pada tahun 1642, Portugis mulai melakukan proses kolonisasi di Timor Timur dengan meruntuhkan pusat kerajaannya, mulai memperluas pengaruh politiknya serta memonopoli perdagangan di daerah pantai tanpa masuk ke pedalaman. Penerapan sistem kolonialisme Portugis terhadap Timor ini lebih didorong faktor tantangan yang datang dari Belanda, dimana Belanda hampir menguasai seluruh pulau di Nusantara termasuk di wilayah Timor yang pada akhirnya wilayah Timor ini terbagi atas dua bagian yaitu wilayah Timor bagian barat yang dikuasai Belanda dan wilayah Timor Timur yang yang kuasai Portugis (Imran, 1983, hlm. 27).

Proses kolonisasi Portugis terhadap Timor Timur belangsung lama, bahkan setelah Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang tahun 1945, Timor-Timur belum juga merdeka. Baru pada tahun 1974 masalah Timor Timur muncul dalam perkembangan politik global. Hal tersebut akibat dari revolusi bunga atau revolusi anyelir yang terjadi di Lisabon Portugis. Dampak dari revolusi bunga tersebut turut memengaruhi sikap Portugis terhadap daerah jajahan. Sikap Portugal tersebut adalah dekolonisasi terhadap daerah jajahannya termasuk Timor Timur.

Sikap dan garis besar politik Portugis terhadap Timor Timur adalah dilaksanakannya dekolonisasi, artinya Pemerintah Portugis yang baru memberikan kelonggaran kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik guna menyalurkan aspirasi mereka tentang bagaimana dekolonisasi itu harus

dilaksanakan (ETAN, 2006, hlm. 15). Proses dekolonisasi dilakukan Portugis berdasarkan prinsip hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa jajahan (Resolusi Majelis Umum PBB 1514/1960). Berbanding lurus dengan kebijakan tersebut, pada Mei 1974 Portugis memberikan izin kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik agar dapat menentukan masa depannya melalui referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi tiga pilihan yaitu: Pertama, menjadi daerah otonomi dalam federasi dengan Portugal. Kedua, menjadi negara bebas dan merdeka. Ketiga, berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Departemen Luar Negeri RI, 1982, hlm. 41).

Kebijakan Portugis tersebut disambut baik dengan dibentuknya partai-partai politik yang mempunyai ideologi dan aspirasinya sendiri. Menurut ETAN (2006, hlm. 16) partai-partai tersebut adalah : Pertama, UDT (*Unio Democratica de Timorese/Uni Demokrasi Rakyat Timor*). Kedua, Fretilin (*Fretilin Revolucioner de Timor Leste Independence/front revolusioner untuk kemerdekaan rakyat Timor Timur*). Ketiga, Apodeti (*Associaco Populer Democratica de Timorese/Asosiasi Rakyat Timor Demokrat*). Selain ketiga partai itu, masih ada partai KOTA (*Klibur Oan Timor Asua'in/Liga Pejuang Timor Timur*) yang menghendaki sistem pemerintahan monarki dan dibentuk pada tanggal 5 September 1974, partai buruh *Trabalhista* yang muncul tanggal 9 Juli 1974, serta ALDILTA (*Asociacao Democratica da Integracao de Timor Leste a Australian/Asosiasi Integrasi Demokratis Rakyat Timor Timur ke Australisa*) (Kuntari, 2008, hlm. 36). Namun, partai KOTA dan *Trabalhista* tidak banyak berpengaruh, mereka hanya menjadi *underbow* salah satu partai UDT. Sedangkan Aldilta, karena tidak mendapatkan dukungan dari Australia dan masyarakatnya sendiri, segera membubarkan diri.

Dengan terbentuknya partai-partai politik tersebut, untuk menentukan nasib dan kedudukan Timor Timur, maka di kemudian hari diadakan referendum dengan ketiga partai organisasi tersebut sebagai wadah pembawa aspirasi rakyat dan sebagai suatu kenyataan yang hidup untuk menentukan nasib sendiri (Soekanto, 1976, hlm. 380). Rencana akan diadakannya referendum tersebut gagal dilaksanakan. Sebagai gantinya untuk menghilangkan pertentangan itu Pemerintah

Portugis mengajak partai-partai berunding di Macau. Pada saat itu hanya partai Fretilin yang tidak hadir. Perundingan tetap berlangsung dan semua sepakat untuk mendirikan pemerintahan sementara Timor Timur sampai pada kemerdekaannya. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur sebagai wujud ketidasepakatannya pada hasil perundingan yang diadakan di Macau. Tindakan Fretilin ini dibalas oleh partai U.D.T, Apodeti, KOTA, dan Tralabista keesokan harinya. Mereka memproklamasikan bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan deklarasi Balibo. Kedua proklamasi tersebut membawa Timor Timur ke dalam perang saudara yang memaksa Pemerintah Indonesia untuk ikut campur dalam menyelesaikan masalah di daerah ini.

Proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi telah disahkan oleh Undang-undang No.7 tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur. Hal ini merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Peristiwa ini tidak dapat disamakan dengan apa yang pernah dialami bangsa ini mengenai Irian Jaya dahulu yang secara *de Jure* memang telah termasuk wilayah Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan mengenai wilayah Timor Timur sebelum berlakunya undang-undang no.7 tahun 1976 jelas bahwa wilayah bekas jajahan Portugis di Timor itu berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara hukum wilayah tersebut merupakan bagian Negara Portugal yang diberi nama "*Provincia Ultramarina*" yang berarti provinsi seberang lautan (Muljono, 1977, hlm. 17).

Selama berintegrasi dengan Indonesia, pembangunan Timor Timur dikelola secara khusus. Kekhususannya meliputi mobilitas orang dalam daerah itu, masyarakat luar terutama masyarakat asing diseleksi ketat sebelum diizinkan masuk dan masyarakat yang keluar dari daerah itu harus melakoni semacam pemeriksaan. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan perjalanan di dalam maupun keluar masuk Timor Timur harus membawa Surat Izin Jalan (Singh, 1998, hlm. 147).

Setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat Timor Timur mendapatkan pengawasan secara ketat, sehingga masyarakat tidak bebas bergerak baik untuk mengusahakan mata pencaharian maupun untuk melakukan kegiatan lainnya. Dengan kondisi seperti ini, kehidupan masyarakat Timor Timur mendapatkan tekanan yang lebih berat. Dalam bidang ekonomi saja, segala barang yang masuk maupun keluar Timor Timur harus melalui Pelaksana Khusus (Laksus) semacam lembaga khusus untuk urusan ekonomi. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan munculnya sebuah istilah bahwa Timor Timur tertutup bagi dunia luar. Dari kondisi inilah kemudian muncul masalah antara lain: Pertama, masyarakat hidup kurang bebas namun tidak mungkin mengatur hidupnya secara wajar. Kedua, mobilitas masyarakat rendah sehingga terhalang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, investasi swasta hampir tidak ada karena pembangunan terus didominasi Pemerintah. Keempat, jumlah anak sekolah meningkat sehingga tuntutan terhadap lapangan pekerjaan juga meningkat (Saldanha, 1996, hlm. 174-175).

Melihat kondisi di atas Gubernur Timor Timur pada saat itu, Mario Viegas Carrascalau meminta kepada Presiden agar Timor Timur dibuka dengan alasan utama menarik investasi. Selain itu, Carrascalau juga meminta pencabutan Surat Izin Jalan agar masyarakat bebas bergerak dan melindungi masyarakat Timor Timur dari himpitan ekonomi. Kemudian pada tahun 1988 sebagai respon dari usulan Carrascalau, Presiden Soeharto menandatangani keputusan yang memberi Timor Timur sebagai wilayah terbuka, sama dengan dengan ke-26 provinsi lainnya di Indonesia. wilayah ini yang sebelumnya merupakan wilayah tertutup bagi pengunjung internasional, kini dibuka. Hal ini memberi kesempatan baru bagi rakyat Timor untuk berhubungan dengan dunia luar. Walaupun berada jauh dari jalur pariwisata Asia, antara tahun 1989 dan 1991 lebih dari 3000 pengunjung internasional datang ke Timor Timur. Ini termasuk wartawan, pekerja LSM dan aktivis yang berkunjung dengan visa turis, yang membawa informasi masuk dan keluar dan banyak diantaranya menjadi pendukung aktif (ETAN, 2006, hlm.118-119).

Dibukanya daerah Timor Timur ini memiliki beberapa dampak yaitu dampak positif bagi masyarakat Timor Timur, masyarakat lebih bebas bergerak

dalam mengatur hidupnya sehingga aktivitas menjadi lebih dinamis. Dengan adanya mobilitas manusia dan interaksi dengan daerah lain, secara ekonomis masyarakat mulai di perkenalkan dengan persaingan. Sedangkan dampak negatifnya ialah dihapusnya Sekretariat Antar Departemen Urusan Timor Timur dan Tim Pelaksana Pembangunan. Dengan adanya penghapusan dua lembaga tersebut, secara otomatis anggaran khusus bagi Timor Timur pun di hapus. Dampak lain, banyaknya orang yang masuk ke Timor Timur. Ada dua kategori masyarakat luar yang masuk ke Timor Timur. Pertama, mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi. Kedua, mereka yang tidak mempunyai keahlian apa-apa. Golongan pertama dikhawatirkan akan merebut pangsa kerja orang asli daerah, sedangkan golongan kedua akan menciptakan beban tambahan bagi daerah Timor Timur dan menimbulkan masalah sosial baru. Dampak negatif lain adalah maraknya demonstrasi-demonstrasi politik oleh para pemuda dan pelajar di beberapa kota terutama di Dili (Singh, 1998, hlm.162).

Di sisi lain, peristiwa integrasi Timor Timur ini memunculkan dua kelompok besar yaitu pro-integrasi dan pro-kemerdekaan Timor Timur. Kelompok pro-integrasi diwakili oleh partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trablhistia. sedangkan kelompok pro-kemerdekaan diwakili oleh partai Fretilin yang sejak awal integrasi menjadi partai oposisi yang menimbulkan gejolak dan perpecahan di dalam masyarakat Timor Timur. Bibit-bibit perpecahan itu tidak dapat diatasi, tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dipisahkan, tetapi tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Timor Timur sekalipun sudah berintegrasi dengan Indonesia.

Munculnya Xanana Gusmao sebagai pemimpin baru Fretilin turut memengaruhi perubahan strategi partai menuju kemerdekaan rakyat Timor Timur. Xanana menganggap bahwa strategi perang gerilya dan pendekatan militer tidak lagi dipandang sebagai pilihan strategi yang cocok untuk menghadapi ABRI dan Indonesia. Seraya menyadari bahwa citra Fretilin yang beraliran “kiri” telah menyebabkan merosotnya dukungan terhadap mereka, baik dari dalam maupun dari luar Timor Timur. Karena hal tersebut Xanana mengubah haluan organisasi itu ke “kanan”, yang menampilkan diri sebagai organisasi nasionalis bagi seluruh rakyat Timor Timur dan bukan sebagai sebuah aliran politik. Ia juga berupaya

untuk mengambil manfaat dari agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Timor, dimana lebih dari 90 persen penganut agama katolik (Singh, 1998, hlm. 157). Perubahan strategi ini sebagian besar dimaksudkan untuk menarik dukungan dari para pemuda-pemudi di Timor Timur, sehingga nanti dapat berdiri di barisan terdapan dalam mengampanyekan seruan kemerdekaan Timor Timur. Singh (1998, hlm.158) mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadikan para pemuda pemudi tersebut sebagai sasaran yang rentan terkena provokasi.

Pertama, itu merupakan reaksi atas terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia setamat mereka bersekolah, Kedua, tingkah laku orang Timor Timur, baik dalam maupun luar Pemerintahan, yang merasa bahwa mereka telah meraih kemenangan dengan integrasi. Ketiga, “dibukanya” Timor Timur bagi dunia luar memberi akses yang mudah kepada daerah ini, yang pada akhirnya menggiring para pemuda untuk mengajukan protes. Keempat, propaganda Fretilin di kota-kota yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga para pemuda yang penuh idealisme menoleh ke Fretilin. Kelima, rencana kunjungan delegasi Portugal ke Timor Timur. Keenam, isu Timor Timur di PBB belum sepenuhnya terselesaikan.

Secara bersamaan faktor-faktor di atas tidak mendorong para pemimpin Fretilin yang saat itu berada di bawah pimpinan Xanana Gusmao untuk memanfaatkan semua sumber ketidakpuasan baru di Timor Timur dan terhadap kenyataan bahwa penggunaan pendekatan secara militer yang dilakukan ABRI dan Pemerintah Indonesia tidak serta merta menyelesaikan masalah. Hal tersebut hanya akan memperlemah kewenangan moral mereka. Dalam perspektif Xanana Gusmao sangatlah penting menerapkan strategi baru ini untuk melawan dan memperlemah Pemerintah Indonesia dan ABRI di Timor Timur.

Strategi baru yang diterapkan Xanana Gusmao tersebut sangat menguntungkan untuk memancing para pemuda dan rakyat Timor Timur untuk melakukan gerakan perlawanan dengan cara berdemonstrasi. Beberapa rangkaian demosntrasi diperkarsai oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam momentum tertentu, salah satunya adalah peristiwa demosntrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan di komplek pemakaman Santa Cruz. Peristiwa ini berawal dari peristiwa kerusuhan di Dili sebelumnya ketika adanya pengumuman kunjungan delegasi Parlemen Portugal dan Profesor Peter Kooijmans,

pengumuman tersebut menimbulkan kegembiraan dan membangkitkan banyak harapan bagi kedua kelompok bersebrangan mengenai masa depan politik Timor Timur. Sejumlah demonstrasi di rencanakan oleh kelompok pro-integrasi maupun kelompok pro-kemerdekaan untuk menyambut kunjungan tersebut. Namun demikian, pada 27 Oktober Pemerintah Portugal membatalkan kunjungan tersebut, pembatalan ini disulut oleh ketidak sepakatan mengenai keikutsertaan seorang wartawan bernama Jill Jollife, yang oleh Pemerintah Indonesia dilarang masuk. Pengumuman pembatalan ini merupakan pukulan telak bagi gerakan perlawanan yang telah melakukan berbagai persiapan untuk unjuk kekuatan di provinsi ini. Akibatnya, pada hari berikutnya tanggal 28 Oktober 1991, baik kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan melakukan serangkaian demonstrasi di Dili, yang pada akhirnya menyebabkan bentrokan antara kedua kelompok tersebut. Bentrokan yang berlangsung di Gereja Motael, mengakibatkan dua pemuda tewas yang bernama Sebastiao Gomes Rangel (kelompok pro-kemerdekaan) dan Afonso Henriques (kelompok pro-integrasi).

Pada tanggal 12 November 1991, kelompok pro-kemerdekaan mengadakan misa atas meninggalnya Sebastiao Gomes di Gereja Motael, Dili. Setelah misa itu yang dilakukan oleh masa yang berjumlah kurang lebih 2500 orang berarak ke komplek pemakaman Santa Cruz. Peristiwa pemakaman ini kemudian menjadi demonstrasi pro-kemerdekaan di komplek pemakaman Santa Cruz. Kegiatan upacara pemakaman tersebut berubah menjadi kegiatan demonstrasi kelompok pro-kemerdekaan berujung pada bentrokan antara para masa demonstran dengan aparat keamanan. Berawal ketika misa jenazah Sebastiao Gomes di Gereja Motael, kemudian masa mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman Santa Cruz, sementara sebagian masa bergabung di tengah perjalanan dan sebagian masa lagi menunggu menunggu untuk bergabung di pemakaman Santa Cruz. Kemudian spanduk dikibarkan yang mengimbau keterlibatan PBB di Timor Timur, mendukung Xanana Gusmao dan penentuan nasib sendiri. aksi demonstrasi tersebut mengandung unsur provokatif sehingga terjadi bentrokan serta penembakan oleh aparat keamanan. Penembakan dimulai ketika para demonstran tiba di pemakaman Santa Cruz. Tentara menembaki dengan senjata-

senjata otomatis ke arah demonstran yang tidak bersenjata (Comissao de Acolhimento Verdede e Reconciliacio, 2010, hlm. 293-294).

Peristiwa yang terjadi di kompleks pemakaman Santa Cruz tersebut menyebabkan jatuhnya korban meninggal maupun luka-luka. Dari pihak militer mengakui ada 19 orang meninggal, sebuah investigasi pemerintah memperkirakan ada sekitar 50, dan sumber-sumber lain mengatakan korban sejumlah 100 orang atau lebih. Satu laporan dari Portugal mengatakan: 271 orang terbunuh, 382 orang luka-luka, dan 250 orang hilang (Ricklefs, 2009, hlm. 672). Hal ini berbeda dengan laporan KPN (Komisi Penyelidik Nasional) bahwa korban jiwa peristiwa Santa Cruz berjumlah 50 korban. Dalam laporan Hadad dkk (1992, hlm. 17), melaporkan bahwa angka korban yang diyakini paling dekat dengan kebenaran itu, merupakan hasil kerja KPN setelah mewawancarai sekitar 130 saksi mata selama 17 hari di Dili dan sekitarnya. Selain 50 korban itu, KPN juga menyebutkan pula jumlah korban yang mengalami luka-luka lebih dari 91 orang.

Peristiwa diatas berhasil direkam kamera wartawan asing dan otomatis menyebar keseluruh saentaro dunia. Sebagai respon, kecaman deras banyak datang untuk Indonesia. Peristiwa ini juga menempatkan kekuasaan Indonesia atas Timor Timur dalam agenda hak asasi manusia internasional. Pemerintah Kanada, Belanda, dan Denmark membatalkan program-program bantuan. Desakan dan simpati masyarakat internasional mendesak agar Indonesia memberikan kesempatan pada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Peristiwa ini tentunya menjadi momentum strategis bagi para pejuang Fretilin yang telah lama mengungungkan kemerdekaan rakyat Timor Timur.

Peristiwa Santa Cruz menjadi titik balik terjadinya perubahan masalah Timor Timur menjadi kepentingan dunia internasional terhadap keberlangsungan integrasi dengan Indonesia. Peristiwa ini merupakan pukulan besar bagi rakyat Timor Timur dan Indonesia terutama nama baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Peristiwa ini terjadi ketika pembangunan Timor Timur sedang digalakan untuk menjaga keberlangsungan integrasi antara rakyat Timor Timur dengan Pemerintah Indonesia. Namun, peristiwa ini membuat semakin kalut situasi di Timor Timur dan merupakan puncak dari segala permasalahan Timor Timur dengan Pemerintah Indonesia hingga pada akhirnya Timor Timur

mendapatkan kemerdekaanya melalui jejak pendapat tahun 1999. Hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang terjadi semakin kalut dan keinginan masyarakat Timor Timur sendiri yang ingin hak menentukan nasib sendiri.

Adapun alasan yang menjadi landasan untuk mengkaji hal tersebut adalah sebagai sebuah kajian sejarah integrasi antara Timor Timur dengan Indonesia. Setelah disahkannya integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia ini nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan di Timor Timur, sebaliknya masalah ini merupakan permasalahan yang kompleks dalam mempertahankan integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Karena kompleksnya permasalahan tersebut, maka peneliti merasa tertarik dalam mengkaji lebih dalam permasalahan inetgrasi antara Timor Timur dengan Indonesia, salah satu permasalahan dalam integrasi adalah pecahnya peristiwa Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 yang berdampak pada integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Untuk mengkaji peristiwa Santa Cruz ini, peneliti berusaha mengkaji dari berbagai sisi sehingga hasil penelitian ini akan mendapatkan suatu penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Permasalahan politik Timor Timur selalu disibukan oleh empat faktor utama. Pertama, konflik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan. Kedua, konflik antara kelompok pro-integrasi dengan kelompok pro-kemerdekaan. Ketiga, adanya tekanan internasional mengenai isu penegakan HAM oleh pemerintah Indonesia di Timor Timur serta. Keempat, ketidakjelasan status Timor Timur di PBB sehingga mendorong keharusan untuk mengadakan pelaksanaan penentuan nasib sendiri (referendum).

Berdasarkan pemaparan di atas kemudian penulis bermaksud mengangkat peristiwa tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991: Dinamika Sejarah Timor Timur Pasca Integrasi Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Maksud yang terkandung pada judul di atas adalah bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan judul kecil sebagai penjabar dalam penelitian ini untuk mengungkapkan bahwa peristiwa Santa Cruz adalah bagian dari dinamika sejarah Timor Timur pasca integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam judul ini penulis mencoba membedah dan memandang peristiwa tersebut dari berbagai sumber

yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terpojokan serta dapat mengambil hikmah dari peristiwa sejarah ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 terjadi?” Untuk memudahkan dalam penelitian dan mengarahkan dalam pembahasan, peneliti menjabarkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana dinamika yang terjadi di Timor Timur pasca berintegrasi ke dalam wilayah NKRI, terutama pada tahun 1976-1990?
- 1.2.2. Bagaimana proses terjadinya peristiwa Santa Cruz 12 November 1991?
- 1.2.3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 terhadap Indonesia dan Timor Timur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Penelitian inipun memiliki tujuan yang mencakup dua aspek, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Maksud tujuan umum di sini adalah untuk mendapatkan informasi dan pelajaran berharga dari peristiwa sejarah di masa lampau agar menjadi pijakan dalam melangkah ke masa depan, sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991: Dinamika Sejarah Timor Timur Pasca Integrasi Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis, yaitu:

- 1.3.1. Mendeskripsikan dinamika sejarah Timor Timur pasca integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.3.2. Menjelaskan jalannya peristiwa Santa Cruz 12 November 1991.
- 1.3.3. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 terhadap Indonesia dan Timor Timur.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Manfaat teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk proses pembelajaran sejarah baik di tingkat SMA, Perguruan Tinggi, maupun masyarakat pada umumnya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan praktis.
- b. Bagi masyarakat, memberikan pesan bagi masyarakat agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa masa lalu agar hidup rukun, berdampingan, dan damai.
- c. Bagi pembelajaran sejarah, menambah wawasan baru mengenai sejarah Integrasi Timor Timor ke dalam NKRI.
- d. Bagi dunia pendidikan, sebagai salah satu referensi bagi dunia pendidikan khususnya materi tentang sejarah Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru kelas XII yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

### 1.5. Struktur Organisasi Penelitian

Rencana penelitian skripsi disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB 1** Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul serta penting untuk diteliti dan memuat alasan peneliti mengapa mengambil judul “Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991: Dinamika Timor Timur Pasca Integrasi Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengarahkan dan mengkaji pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penelitian.

**BAB II** Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoritis. Bab ini akan berisi tentang penjabaran literatur-literatur yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sumber-sumber tersebut dikaji dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini terdapat landasan teoritis yang

digunakan peneliti sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini akan membahas mengenai metode dan teknik penelitian yang peneliti gunakan dalam mencari, mengolah, serta menganalisis sumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah teknik studi *literatur*. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian yang terdiri dari tahap persiapan, penelitian, pelaksanaan sampai hasil penelitian.

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini akan berisi pembahasan mengenai bagaimana dinamika sejarah Timor Timur pasca Integrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu 1976-1990. Bagaimana jalannya peristiwa Santa Cruz , proses terjadinya peristiwa Santa Cruz yang akan dibahas secara objektif dari berbagai sudut pandang, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia dan Timor Timur.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini mengemukakan kesimpulan analisis peneliti secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan secara singkat. Selain itu dikemukakan juga implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.